

**MATRIKS TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

Komitmen 1
Isu Strategis
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab
Kementerian/Lembaga Terkait
Bappenas

: Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
: Anti-Korupsi dan Anggaran
: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Komisi Informasi Pusat
:
: Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan; Direktorat Politik dan Komunikasi

CSO Mitra
Point of Contact Kementerian/Lembaga
Point of Contact CSO

: Indonesia Corruption Watch (ICW); Transparency International Indonesia (TII)
: Ranga
: Siti Juliantari (siti.juliantari@antikorupsi.org), Christian Tuturoong (kes@antikorupsi.org), Agus Sarwono (asarwono@ti.or.id)

Sasaran Keberhasilan	No	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1.	Publikasi transaksi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah di e-katalog	LKPP	Dilaksanakannya rapat yang membahas komponen informasi transaksi e-katalog yang akan dipublikasi bersama dengan masyarakat sipil	Mempublikasi komponen informasi transaksi e-katalog berdasarkan hasil rapat pembahasan	Mempublikasi komponen informasi transaksi e-katalog berdasarkan hasil rapat pembahasan	Mempublikasi komponen informasi transaksi e-katalog berdasarkan hasil rapat pembahasan	
		Mendorong publikasi transaksi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah	Organisasi Masyarakat Sipil	Adanya diskusi untuk menyepakati komponen informasi transaksi yang harus dipublikasi K/L/PD di e-katalog	Penyerahan komponen informasi transaksi yang harus dipublikasi K/L/PD			
	2.	Publikasi secara rinci informasi pengadaan darurat	LKPP	Pembahasan terkait komponen informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE dengan melibatkan masyarakat sipil	Penyesuaian informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan pada LPSE	Penyesuaian informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan pada LPSE	Penyesuaian informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan pada LPSE	
		Mendorong publikasi lebih rinci informasi pengadaan darurat	Organisasi Masyarakat Sipil	Keterlibatan dalam diskusi untuk menyepakati informasi yang perlu dipublikasi dalam kanal PBJ darurat	Penyerahan komponen informasi yang perlu dipublikasi dalam kanal PBJ darurat			

Sasaran Keberhasilan	No	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
	3.	Mendorong efektivitas kanal e-pengaduan dalam menangani pengaduan masyarakat	LKPP	Persiapan integrasi inspektorat K/L/PD di dalam sistem e-pengaduan	Melibatkan partisipasi inspektorat K/L/PD ke sistem e-pengaduan	Menambah keterlibatan partisipasi inspektorat pada sistem e-pengaduan	Menambah keterlibatan partisipasi inspektorat pada sistem e-pengaduan	
		Mendorong efektivitas kanal e-pengaduan dalam menangani pengaduan masyarakat	Organisasi Masyarakat Sipil		Pendampingan integrasi inspektorat K/L/PD di dalam sistem e-pengaduan	Pendampingan integrasi inspektorat K/L/PD di dalam sistem e-pengaduan	Pendampingan integrasi inspektorat K/L/PD di dalam sistem e-pengaduan	
	4.	Pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terintegrasi dan terbuka	LKPP	Pembahasan terkait data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKAP dengan melibatkan OMS	Persiapan integrasi data SIKAP dengan data Beneficial Ownership Kementerian Hukum dan HAM	Integrasi data SIKAP dengan BO Kemenkumham	Integrasi data SIKAP dengan BO Kemenkumham	
		Mendorong pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terintegrasi dan terbuka	Organisasi Masyarakat Sipil	Koordinasi dengan LKPP mengenai data kinerja penyedia yang akan terpublikasi di SIKAP	Koordinasi dengan LKPP mengenai pengembangan database SIKAP yang terintegrasi	Terlaksananya forum diskusi kedua dengan melibatkan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil	Terlaksananya forum diskusi ketiga dengan melibatkan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil	
	5.	Publikasi informasi atau dokumen Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2021 di SPSE sesuai dengan	LKPP	1. Pembahasan terkait informasi yang wajib dibuka sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 yang berada di bawah kewenangan LKPP dengan melibatkan OMS 2. Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk	1. Persiapan fitur publikasi yang mengakomodir komponen informasi PBJ berdasarkan hasil kesepakatan 2. Persiapan pengembangan kode unik	1. Pengembangan fitur publikasi yang mengakomodir komponen informasi PBJ berdasarkan hasil kesepakatan. 2. Pengembangan kode unik	1. Tersedianya fitur publikasi yang mengakomodir komponen informasi PBJ berdasarkan hasil kesepakatan 2. Tersedianya kode unik untuk menyatukan pekerjaanpekerja	

Sasaran Keberhasilan	No	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
		kewenangan LKPP		menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama	berdasarkan hasil kesepakatan	berdasarkan hasil kesepakatan	an yang terkait dalam satu objek program yang sama berdasarkan hasil kesepakatan	
		Publikasi informasi atau dokumen Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2021 di SPSE sesuai dengan kewenangan LKPP	Organisasi Masyarakat Sipil	1. Adanya diskusi untuk menyepakati informasi yang wajib dibuka sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 yang berada di bawah kewenangan LKPP 2. Adanya diskusi terkait mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama	1. Koordinasi publikasi informasi sesuai dengan kesepakatan diskusi 2. Koordinasi dengan LKPP terkait pengembangan kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan terkait dalam satu objek program yang sama	Koordinasi dengan LKPP terkait pengembangan kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan terkait dalam satu objek program yang sama		
	6.	Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP	Pembahasan MOU antara LKPP dengan OMS	1. Tersedianya MOU antara LKPP dengan OMS berdasarkan pembahasan yang telah dilaksanakan sebelumnya 2. Keterlibatan dalam peningkatan kompetensi terkait pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah	Keterlibatan dalam peningkatan kompetensi terkait pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah	1. Keterlibatan dalam peningkatan kompetensi terkait pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah 2. Keterlibatan dalam pelatihan bagi UMKM mengenai peluang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Payung Hukum	

Sasaran Keberhasilan	No	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
							atau ketentuan yang berlaku 3. Keterlibatan dalam perumusan audit sosial mengenai peluang UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	
		Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa	Organisasi Masyarakat Sipil	Pembahasan MoU antara LKPP dengan OMS	Penyelenggaraan peningkatan kompetensi terkait pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah	1. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi terkait pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah 2. Penyusunan modul pengaduan barang/jasa bagi organisasi masyarakat sipil	1. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi terkait pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah 2. Keterlibatan dalam perumusan audit sosial mengenai peluang UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	
	7.	Implementasi informasi PBJ Pemerintah menurut Perki 1/2021	KIP	Review Indikator Pengadaan Barang/Jasa untuk Monev Keterbukaan Informasi Publik yang melibatkan masyarakat sipil	Publikasi Kuisioner Indikator Penilaian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik	Keterlibatan di dalam FGD terkait Review Implementasi Monev Keterbukaan Informasi Publik terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
		Mendorong implementasi informasi PBJ Pemerintah menurut Perki 1/2021	Organisasi Masyarakat Sipil	Review Indikator Pengadaan Barang/Jasa untuk Monev Keterbukaan Informasi Publik yang melibatkan masyarakat sipil		FGD terkait Review Implementasi Monev Keterbukaan Informasi Publik terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		

**MATRIKS TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

Komitmen 2 : Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership
Isu Strategis : Anti-Korupsi dan Anggaran
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab : Kementerian Hukum dan HAM
 Kantor Staf Presiden
 PPATK
 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Kementerian ATR / BPN
 Kementerian Koperasi dan UKM
 Kementerian Perdagangan
 Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Otoritas Jasa Keuangan
 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Kementerian/Lembaga Terkait :
Bappenas : Direktorat Hukum dan Regulasi
CSO Mitra : Publish What You Pay, Transparency International Indonesia, Indonesia Corruption Watch
Point of Contact Kementerian/Lembaga :
Point of Contact CSO : Aryanto Nugroho

Sasaran Keberhasilan	No	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Dukung
Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership	1	Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK)	Review Terhadap Regulasi, Standar, Struktur dan Kualitas Basis Data BO di Masing-Masing Institusi (Berdasarkan Perpres 13/2018)	Review Terhadap Regulasi, Standar, Struktur dan Kualitas Basis Data BO di Masing-Masing Institusi (Berdasarkan Perpres 13/2018)			
			1. Kantor Staf Presiden 2. PPATK 3. Kementerian Hukum dan HAM	Laporan review Sectoral Risk Assessment (SRA) Data BO	Laporan review Sectoral Risk Assessment (SRA) Data BO	Pelaksanaan Proses Verifikasi	Pelaksanaan Proses Verifikasi	

			1. KESDM 2. KLHK 3. Kementan 4. Kementerian ATR/BPN 5. KemenKOP dan UKM 6. Kemendag 7. Kemenkumham 8. Stranas-PK 9. BKPM 10.OJK 11.LKPP 12.Kemenkeu	Pengumpulan Basis Data BO yang Terstandarisasi di Masing-Masing Institusi	Pengumpulan Basis Data BO yang Terstandarisasi di Masing-Masing Institusi	Pengumpulan Basis Data BO yang Terstandarisasi di Masing-Masing Institusi	Pengumpulan Basis Data BO yang Terstandarisasi di Masing-Masing Institusi	
--	--	--	--	---	---	---	---	--

			PWYP ICW Transparency International Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan CSO dalam Review Terhadap Regulasi, Standar, Struktur dan Kualitas Basis Data BO di Masing-Masing Institusi (Berdasarkan Perpres 13/2018) • Penyusunan Kajian Kepatuhan Korporasi Dalam Deklarasi BO 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan CSO dalam Review Terhadap Regulasi, Standar, Struktur dan Kualitas Basis Data BO di Masing-Masing Institusi (Berdasarkan Perpres 13/2018) • Keterlibatan CSO dalam Cleansing Data BO Yang Tersedia (Baik AHU maupun Institusi Lain) Dengan Data Legal Owner, Data NIK, NPWP 			

**MATRIKS TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

Komitmen 3 : Pelindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup
Isu Strategis : Ruang Kewargaan dan Demokrasi
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Kepolisian Republik Indonesia
Kementerian/Lembaga Terkait :
Bappenas : Direktorat Hukum dan Regulasi; Direktorat Pertahanan dan Keamanan
CSO Mitra : Auriga Nusantara
Point of Contact Kementerian/Lembaga : Unun Kholisa (Komnas HAM); Eko Susanda (Dittipidter Bareskrim Polri)
Point of Contact CSO : Hilman Afif (hilman@auriga.or.id)

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
Pelindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup	1.	Keterlibatan dalam Penyusunan Kajian Rekomendasi Kepastian Pelindungan Hukum Bagi Pembela Lingkungan	Komnas HAM	1. Memberikan masukan atas data ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan yang merupakan basis data penyusunan outline kajian 2. FGD yang membahas mengenai ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan	Memberikan masukan atas data kejadian ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan	Supervisi atas penyusunan draft kajian rekomendasi kepastian pelindungan hukum bagi pembela lingkungan	Monitoring pelaksanaan rekomendasi hasil kajian	
			Kepolisian RI	Menerima data mengenai peristiwa yang dianggap sebagai ancaman terhadap pembela lingkungan	Menganalisa dan mengevaluasi perkara yang menjadikan ancaman terhadap pembela lingkungan	Keterlibatan dalam penyusunan draft kajian rekomendasi kepastian pelindungan hukum bagi pembela lingkungan	Menerima kajian rekomendasi dan menyusun instrumen peraturan mengenai pelindungan hukum bagi pembela lingkungan	
		Penyusunan Kajian Rekomendasi Kepastian Pelindungan Hukum Bagi Pembela Lingkungan	Auriga Nusantara	1. Tersedianya masukan mengenai data ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan 2. Keterlibatan dalam FGD dan penyusunan <i>outline</i> kajian kepastian pelindungan hukum bagi pembela lingkungan	Tersedianya masukan mengenai data kejadian ancaman dan literatur pendukung kajian	Penyusunan draft kajian rekomendasi kepastian pelindungan hukum bagi pembela lingkungan	Penyerahan kajian rekomendasi kepada Kepolisian RI	

**MATRIKS TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

Komitmen 4	: Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
Isu Strategis	: Ruang Kewargaan dan Demokrasi
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian/Lembaga Terkait	:
Bappenas	: Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika
CSO Mitra	: Yayasan TIFA
Point of Contact Kementerian/Lembaga	: Aulia Zulfa (Dit. Tata Kelola Aptika Kominfo)
Point of Contact CSO	: Debora Irene Christine (Project Manager for Data Policy and Governance)

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi	1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L	Kemenkominfo		1. Konsultasi publik untuk menjangkau masukan publik terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai mekanisme koordinasi antara lembaga PDP dengan K/L terkait 2. Tersedianya masukan atas rencana kajian yang akan dilakukan	Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP	Tersedianya Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP	
		Keterlibatan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga	Yayasan TIFA		1. Keterlibatan dalam konsultasi publik untuk memberikan masukan terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah	Terlibat dalam uji publik Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP	Tersedianya tanggapan/ masukan atas Rancangan Peraturan Pemerintah yang tersusun	

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
		PDP yang mengatur mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L			mengenai mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L 2. Tersedianya rekomendasi pengaturan mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L			
	2.	Diterimanya rekomendasi peraturan turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengenai pengendali data gabungan dari masyarakat sipil	Kemenkominfo	Keterlibatan dengan memberikan masukan atas kajian partisipatoris untuk proses penyusunan rekomendasi rancangan peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan		Keterlibatan proses penyusunan rekomendasi rancangan peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan	Diterimanya rekomendasi peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan	
		Penyusunan rekomendasi peraturan turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengenai pengendali data gabungan	Yayasan TIFA	Penyelenggaraan penyusunan kajian partisipatoris untuk proses penyusunan rekomendasi peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan	Penyelenggaraan kajian partisipatoris untuk menyusun rekomendasi peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan	Tersusunnya rekomendasi rancangan peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan	Tersedianya rekomendasi rancangan peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan	

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
	3.	Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar negeri	Kemenkominfo	1. Konsultasi publik untuk menjaring masukan publik terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai peran lembaga PDP dalam pengaturan transfer data ke luar negeri terlaksana 2. Tersedianya masukan atas rencana kajian yang akan dilakukan	Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai lembaga PDP	Tersedianya Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP	1. Konsultasi publik untuk menjaring masukan publik terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai peran lembaga PDP dalam pengaturan transfer data ke luar negeri terlaksana 2. Tersedianya masukan atas rencana kajian yang akan dilakukan	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar negeri	Yayasan TIFA		1. Keterlibatan dalam konsultasi publik untuk memberikan masukan terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar negeri	Terlibat dalam uji publik Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP	Tersedianya tanggapan/ masukan atas Rancangan Peraturan Pemerintah yang tersusun	

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
					2. Tersedianya rekomendasi pengaturan peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar negeri			
	4.	Keterlibatan dalam forum diskusi multipihak dalam membahas perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksana UU PDP	Kemenkominfo		Keterlibatan dalam pembahasan mengenai perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksana UU PDP	Keterlibatan dalam pembahasan mengenai perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksana UU PDP	Keterlibatan dalam pembahasan mengenai perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksana UU PDP	
		Pelaksanaan forum diskusi multipihak dalam membahas perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksana UU PDP	Yayasan TIFA	Terlaksananya penjangkaran masukan dari kelompok masyarakat sipil dan sektor privat mengenai proses dan substansi peraturan pelaksana UU Perlindungan Data Pribadi	Terlaksananya forum diskusi pertama dengan melibatkan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil	Terlaksananya forum diskusi kedua dengan melibatkan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil	Terlaksananya forum diskusi ketiga dengan melibatkan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil	

**MATRIKS TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

Komitmen 5 : Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dari Disinformasi
Isu Strategis : Ruang Kewargaan dan Demokrasi
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab : Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kementerian/Lembaga Terkait :
Bappenas : Direktorat Politik dan Komunikasi
CSO Mitra : Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL)
Point of Contact : Nurdiansyah (nurdiansyah789@gmail.com) - Bawaslu
Point of Contact CSO : Anwar Razak (anwar_razak@yahoo.com) - KOPEL

Sasaran Keberhasilan	No	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Dukung
Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum	1	Tersusunnya mekanisme penanganan pengaduan Disinformasi dalam Pemilihan Umum	Badan Pengawasan Pemilihan Umum	Adanya draft mekanisme penanganan panduan Disinformasi dalam Pemilu 2024	Mekanisme penanganan pengaduan disinformasi disetujui oleh Ketua Bawaslu	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan mekanisme pengaduan disinformasi		
			KOPEL	- Audiensi untuk menyampaikan policy brief pentingnya panduan penanganan pengaduan disinformasi dalam Pemilu - Adanya poin-poin masukan untuk mekanisme penanganan pengaduan disinformasi	Hasil review rancangan awal mekanisme pengaduan disampaikan kepada komisioner Bawaslu	Input hasil monitoring CSO terhadap pelaksanaan mekanisme pengaduan disinformasi pemilu 2024		
	2	Pelaksanaan Forum Multistakeholder dalam penyusunan mekanisme penanganan pengaduan Disinformasi	Badan Pengawasan Pemilihan Umum	Keterlibatan dalam Forum Multistakeholder dalam rangka Penyusunan Mekanisme Penanganan Disinformasi Pemilu	Keterlibatan dalam Forum Multistakeholder dalam rangka Penyusunan Mekanisme Penanganan Disinformasi Pemilu	Keterlibatan dalam Forum Multistakeholder dalam rangka Penyusunan Mekanisme Penanganan Disinformasi Pemilu		
			KOPEL	Memfasilitasi Forum multistakeholder memberikan masukan pada draft mekanisme penanganan pengaduan disinformasi	Memfasilitasi Forum multistakeholder memberikan masukan pada draft akhir mekanisme penanganan pengaduan disinformasi	Memfasilitasi Forum multistakeholder memberikan masukan pada monev penanganan pengaduan disinformasi		

**MATRIKS TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

Komitmen 6 : Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum
Isu Strategis : Ruang Kewargaan dan Demokrasi
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab : Komisi Pemilihan Umum
Kementerian/Lembaga Terkait :
Bappenas : Direktorat Politik dan Komunikasi
CSO Mitra : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Point of Contact Kementerian/Lembaga : Adhi Putra - KPU
Point of Contact CSO : Dhika (dhika@perludem.org) - Perludem

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Dukung
Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum	1.	Tersedianya Data Pemilu dalam format data terbuka (<i>open data</i>)	Komisi Pemilihan Umum	Tersedianya Data Profil Partai Politik Peserta Pemilu (SIPOL) Tersedianya data peta daerah pemilihan dalam format data terbuka (SIDAPIL)	Tersedianya Data Peserta Pemilu (Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD) dalam format data terbuka (SILON)	Tersedianya data laporan dana kampanye Peserta Pemilu dalam format data terbuka (SIDAKAM) Tersedianya data hasil pemilu dalam format data terbuka (Hasil Form C1)	Tersedianya data hasil Pemilu dalam format data terbuka (SIREKAP) Terkumpulnya dataset Tahapan Pemilu 2024 dalam portal Open Data KPU	
			Perludem	Terselenggaranya workshop dengan penyelenggara Pemilu dan Masyarakat Sipil untuk menyusun rekomendasi jenis-jenis data dalam setiap dataset Pemilu	Terselenggaranya workshop dengan masyarakat sipil dan komunitas teknologi untuk menyusun rekomendasi strategi penyediaan serta pemanfaatan data Pemilu	Terselenggaranya koordinasi dengan KPU mengenai persiapan penyediaan data laporan dana kampanye dan hasil pemilu dalam format data terbuka	Terselenggaranya koordinasi dengan KPU mengenai integrasi data Pemilu	

**MATRIKS TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

Komitmen 7 : Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas

Isu Strategis : Pelayanan Publik yang Inklusif

Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab : Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian/Lembaga Terkait :

Bappenas : Direktorat Politik dan Komunikasi

CSO Mitra : Suarise

Point of Contact Kementerian/Lembaga : Hardy - Kominfo

Point of Contact CSO : Rahma (rahmaut@suarise.com) - Suarise

Sasaran Keberhasilan	No	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Dukung
Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas	1.	Tersusunnya pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas termasuk aksesibilitas digital	Kementerian Kounikasi dan Informatika	Merumuskan pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas termasuk aksesibilitas digital	Menyusun pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas termasuk aksesibilitas digital		Melaksanakan sosialisasi terkait pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas termasuk aksesibilitas digital	
			Suarise	Melakukan penyusunan pemetaan permasalahan dan gambaran singkat terkait kondisi aksesibilitas digital bagi kelompok disabilitas	Menyusun kajian terkait: (1) identifikasi kebutuhan keterbukaan data bagi disabilitas; (2) Urgensi aksesibilitas digital untuk dokumen digital; (3) Pemberian masukan atau saran terkait percepatan capaian aksesibilitas digital bagi disabilitas	Berpartisipasi aktif dalam penyusunan Pedoman terkait aksesibilitas digital bagi kelompok disabilitas	Melaksanakan sosialisasi terkait pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas termasuk aksesibilitas Digital	

**MATRIKS TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

Komitmen 8 : Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa
Isu Strategis : Pelayanan Publik yang Inklusif
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab : Kementerian Dalam Negeri
Kementerian/Lembaga Terkait :
Bappenas : Direktorat Pembangunan Daerah
CSO Mitra : Transparency International Indonesia (TII)
Point of Contact Kementerian/Lembaga : Nuke Firda; Nine Hargi; Basuki (Ditjen Bina Pemdes)
Point of Contact CSO : Agus Sarwono (asarwono@ti.or.id)

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa	1.	Publikasi APBDes dan pertanggungja waban APBDes melalui website desa	Kementerian Dalam Negeri	Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi aparat pemerintah desa		Review bersama hasil pendampingan	Diseminasi hasil pembelajaran dan evaluasi pelaksanaan	
		Publikasi APBDes dan pertanggungja waban APBDes melalui website desa	Transparency International Indonesia	1. Pendampingan aparat desa dalam penguatan keterbukaan informasi publik 2. Peningkatan kapasitas aparat desa	1. Pendampingan aparat desa dalam penyusunan daftar informasi publik dan klasifikasi informasi publik 2. Pendampingan aparat pemerintah desa dalam penyusunan rencana belanja pengadaan barang dan jasa desa	Penyusunan matriks rencana belanja desa	1. Pemerintah desa mempublikasi informasi keuangan desa 2. Pemerintah desa mempublikasi rencana umum belanja desa setiap tahunnya	
	2.	Penguatan warga dalam pengawasan keuangan desa	Kementerian Dalam Negeri	Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi masyarakat dan pendamping desa.	Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi masyarakat dan pendamping desa.	Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi masyarakat dan pendamping desa.	Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi masyarakat dan pendamping desa.	
		Penguatan warga dalam pengawasan keuangan desa	Transparency International Indonesia	Adanya kelompok masyarakat yang aktif mengawasi keuangan desa	Tersedianya modul pemantauan sistem keuangan desa	Peningkatan Kapasitas warga desa dalam pengawasan sistem keuangan desa		

**MATRIKS TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

Komitmen 9

Isu Strategis

Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab

Kementerian/Lembaga Terkait

Bappenas

CSO Mitra

Point of Contact Kementerian/Lembaga

Point of Contact CSO

: Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

: Pelayanan Publik yang Inklusif

: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

:

: Direktorat Pembangunan Daerah

: Wahana Visi Indonesia (WVI); Yayasan TIFA

: Lisda (Kemendesa PDTT)

: Rikardus Wawo – WVI (rikardus_wawo@wvi.org); Nurma Fitrianingrum – Project Officer TIFA

(nurma@tifafoundation.id)

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa	1.	Implementasi akuntabilitas sosial dalam proses musyawarah desa	Kemendes PDTT	Persiapan Sosialisasi Akuntabilitas Sosial dan Pemerintah Desa	Sosialisasi Akuntabilitas Sosial dan Pemerintah Desa	Fasilitasi implementasi Akuntabilitas Sosial	Replikasi Fasilitasi Implementasi Akuntabilitas Sosial	
		Implementasi akuntabilitas sosial dalam proses musyawarah desa	Organisasi Masyarakat Sipil	1. Tersedianya kajian & Juknis akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa. 2. Diadakannya dialog/diskusi publik mengenai akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa	Sosialisasi dan pelatihan Juknis Akuntabilitas Sosial dalam Musyawarah Desa.	Implementasi akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa melalui pilot project	Replikasi model akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa	
	2.	Implementasi metode Program Review dalam proses pembangunan pemerintah di tingkat desa	Kemendes PDTT	Persiapan Sosialisasi Akuntabilitas Sosial dan Pemerintah Desa	Sosialisasi Akuntabilitas Sosial dan Pemerintah Desa	Fasilitasi implementasi Akuntabilitas Sosial	Replikasi Fasilitasi Implementasi Akuntabilitas Sosial	
		Implementasi metode Program Review sebagai dalam proses pembangunan pemerintah di tingkat desa.	Organisasi Masyarakat Sipil	1. Tersedianya peraturan di tingkat desa yang mendukung dan mengesahkan pelaksanaan Program Review sebagai metode mendukung Akuntabilitas Sosial.	1. Sosialisasi akuntabilitas sosial pada area non uji coba. 2. Tercapainya akuntabilitas sosial program pemerintah menggunakan metode Program Review. 3. Terlaksananya uji coba Program Review sebagai metode alternatif akuntabilitas sosial di tingkat Kabupaten.	Terselenggaranya seminar/webinar publik mengenai akuntabilitas sosial dan metode-metode untuk mencapainya baik di tingkat desa maupun kabupaten (salah satunya pengalaman Program Review di tingkat Desa dan Kabupaten).		

**MATRIKS TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

Komitmen 10

Isu Strategis

Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab

Kementerian/Lembaga Terkait

Bappenas

OMS Mitra

Point of Contact Kementerian/Lembaga

Point of Contact OMS

: Terlaksananya Proses Penyusunan RUU KKR untuk Memenuhi Hak atas Kebenaran bagi Korban Pelanggaran HAM
: Akses terhadap Keadilan
: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; Kementerian PPN/Bappenas
: Direktorat Hukum dan Regulasi
: Yayasan TIFA, Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan, KontraS Aceh
: Dian (BPHN)
: TIFA Foundation (public@tifafoundation.id);
Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan (info@indonesiauntukkemanusiaan.org)

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
Terlaksananya proses penyusunan RUU KKR untuk memenuhi hak atas kebenaran bagi korban pelanggaran HAM	1.	Tersedianya Naskah Akademik (NA) RUU KKR sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu	BPHN	-	1. Terbentuknya tim penyusunan NA untuk RUU KKR oleh BPHN 2. Diskusi awal penyusunan NA untuk RUU KKR	Penyusunan NA untuk RUU KKR oleh BPHN yang melibatkan masukan dari masyarakat sipil	Tersusunnya NA untuk RUU KKR oleh BPHN yang melibatkan masyarakat sipil	NA untuk RUU KKR yang disusun dengan masukan dari masyarakat sipil
	2.	Adanya <i>policy paper</i> mengenai KKR dari masyarakat sipil sebagai salah satu dasar pemikiran untuk mendukung kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu	OMS (Yayasan TIFA, Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan, KontraS Aceh)	Adanya proses penyusunan <i>policy paper</i> dari masyarakat sipil untuk mendukung penyusunan NA dan draf RUU KKR	1. Adanya dokumen <i>policy paper</i> mengenai KKR dari masyarakat sipil untuk mendukung penyusunan NA dan draf RUU KKR 2. Keterlibatan masyarakat sipil dalam diskusi penyusunan NA untuk RUU KKR	Adanya pemberian masukan dari masyarakat sipil dalam proses penyusunan NA untuk RUU KKR oleh BPHN	-	<i>Policy paper</i> tentang KKR dari koalisi masyarakat sipil mengenai urgensi KKR sebagai konsensus masyarakat sipil pembela HAM bersama komunitas korban pelanggaran HAM dan pakar

**MATRIKS TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

Komitmen 11

Isu Strategis

Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab

Kementerian/Lembaga Terkait

Bappenas

OMS Mitra

Point of Contact Kementerian/Lembaga

Point of Contact OMS

: Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia
: Akses terhadap Keadilan
: Kejaksaan Agung; Mahkamah Agung (MA); Kepolisian RI
: -
: Direktorat Hukum dan Regulasi
: Indonesia Judicial Research Society (IJRS); Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI); Asosiasi LBH APIK Indonesia
: Etti Husni (Kejaksaan Agung); Mila (Mahkamah Agung); Emma (Kepolisian RI)
: Dio Ashar Wicaksana (dio@ijrs.or.id); Gina Sabrina (ginasabrina@pbhi.or.id)

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
Aksesibilitas dan akuntabilitas proses peradilan di Indonesia	1.	Adanya peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum	Kejaksaan Agung	Terlaksananya peluncuran pedoman penanganan perkara yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan	Adanya penyusunan materi sosialisasi dari peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum di Kejaksaan	Adanya sosialisasi dari peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum Penyusunan kurikulum mata diklat untuk materi Penanganan Perkara yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan	Penyelenggaraan diklat Akses terhadap Keadilan bagi penyandang disabilitas	1. Peraturan teknis berbentuk pedoman penanganan perkara yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan 2. Materi sosialisasi peraturan teknis 3. Kurikulum mata diklat untuk penanganan perkara yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai peraturan teknis
			OMS (IJRS)	Adanya peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum di Kejaksaan berdasarkan masukan dari masyarakat sipil	Adanya penyusunan materi sosialisasi dari peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum di Kejaksaan	Adanya sosialisasi dari peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum	-	

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
	2.	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Kejaksaan Agung	Adanya diskusi awalan antara Kejaksaan dengan OMS terkait rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Adanya diskusi terkait alat ukur monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Adanya diseminasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Adanya laporan tertulis hasil monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	1. Alat ukur monitoring dan evaluasi penanganan perempuan berhadapan dengan hukum 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
			MA	Adanya diskusi awalan antara MA dengan OMS terkait rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Adanya diskusi terkait alat ukur monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Adanya diseminasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Adanya laporan tertulis hasil monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	
			OMS (IJRS, PBHI, LBH APIK)	Adanya diskusi awalan antara Kejaksaan dan MA dengan OMS terkait rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Adanya diskusi terkait alat ukur monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Adanya diseminasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Adanya laporan tertulis hasil monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	
	3.	Adanya evaluasi terhadap implementasi dari digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Kejaksaan Agung	Adanya diskusi awalan untuk membahas hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Adanya diskusi antara Kejaksaan Agung dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan oleh APH berdasarkan temuan kajian OMS	Adanya pelaksanaan tindak lanjut dari hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Adanya laporan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	1. Kajian dari OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan 2. Laporan pelaksanaan

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
			Kepolisian RI	Adanya diskusi awalan untuk membahas hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Adanya diskusi antara Kepolisian RI dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan oleh APH berdasarkan temuan kajian OMS	Adanya pelaksanaan tindak lanjut dari hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Adanya laporan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	tindak lanjut oleh APH dari hasil kajian OMS 3. Laporan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh APH dari hasil kajian OMS
			MA	Adanya diskusi awalan untuk membahas hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Adanya diskusi antara MA dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan oleh APH berdasarkan temuan kajian OMS	Adanya pelaksanaan tindak lanjut dari hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Adanya laporan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	
			OMS (IJRS, PBHI, LBH APIK)	Adanya diseminasi hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan Adanya diskusi awalan antara OMS dengan Kejaksaan, Kepolisian RI dan MA mengenai hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Adanya diskusi antara OMS dengan Kejaksaan, Kepolisian RI dan MA terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan oleh APH berdasarkan temuan kajian OMS	-	Adanya laporan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut dari hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	

**MATRIKS TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

Komitmen 12

Isu Strategis

Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab

Kementerian/Lembaga Terkait

Bappenas

OMS Mitra

Point of Contact Kementerian/Lembaga

Point of Contact OMS

: Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia
: Akses terhadap Keadilan
: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN); Mahkamah Agung (MA)
: -
: Direktorat Hukum dan Regulasi
: Indonesia Judicial Research Society (IJRS); Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI); Asosiasi LBH APIK Indonesia
: BPHN (panitiapengawaspusat@gmail.com)
: Dio Ashar Wicaksana (dio@ijrs.or.id); Gina Sabrina (ginasabrina@pbhi.or.id)

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
Perluasan pemberian bantuan hukum yang berkualitas dan aksesibel di Indonesia	1.	Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	BPHN	Adanya diskusi antara BPHN dan OMS dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum		Adanya draf awal Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	Adanya sosialisasi awal terkait Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	1. Dokumen Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum 2. Laporan hasil sosialisasi
			OMS (IJRS, PBHI, LBH APIK)	Adanya diskusi antara BPHN dan OMS dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum		Adanya draf awal Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	Adanya sosialisasi awal terkait Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	
	2.	Adanya pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi terkait bantuan hukum	BPHN	Adanya diskusi awalan antara BPHN dan OMS terkait rencana pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal	-	Adanya diskusi antara BPHN dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian OMS terkait	Adanya tindak lanjut dari hasil diskusi dan rekomendasi berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan	

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
				informasi bantuan hukum		pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	1. Kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum 2. Laporan hasil diskusi 3. Laporan tindak lanjut hasil diskusi dan rekomendasi berdasarkan kajian OMS
			MA	Adanya diskusi awalan antara MA dan OMS terkait rencana pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	-	Adanya diskusi antara MA dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	Adanya tindak lanjut dari hasil diskusi dan rekomendasi berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	
			OMS (IJRS, PBHI, LBH APIK)	Adanya diskusi awalan antara OMS dengan BPHN dan MA terkait rencana pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	Adanya diseminasi awal dari OMS terhadap hasil kajian terkait pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	Adanya diskusi antara OMS dengan BPHN dan MA terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	Adanya tindak lanjut dari hasil diskusi dan rekomendasi berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	

**MATRIKS TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

Komitmen 13

Isu Strategis

Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab

Kementerian/Lembaga Terkait

Bappenas

OMS Mitra

Point of Contact Kementerian/Lembaga

Point of Contact OMS

: Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia

: Akses terhadap Keadilan

: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

: -

: Direktorat Hukum dan Regulasi

: Indonesia Judicial Research Society (IJRS); Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM

Indonesia (PBHI); Asosiasi LBH APIK Indonesia

: BPHN (panitiapengawaspusat@gmail.com)

: Dio Ashar Wicaksana (dio@ijrs.or.id); Gina Sabrina (ginasabrina@pbhi.or.id)

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia	1.	Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan sebagai masukan untuk Rancangan UU Bantuan Hukum (RUU Bankum)	BPHN	Adanya diskusi antara BPHN dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan	Adanya diskusi berkala antara BPHN dan OMS dalam rangka pemberian masukan terhadap proses penyusunan RUU Bankum			1. Kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan 2. Masukan untuk proses penyusunan RUU Bankum
			OMS (IJRS, PBHI, LBH APIK)	Adanya diskusi antara OMS dan BPHN terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan	Adanya diskusi berkala antara BPHN dan OMS dalam rangka pemberian masukan terhadap proses penyusunan RUU Bankum			
	2.	Adanya penguatan kapasitas pemberi bantuan hukum (PBH) untuk kelompok rentan	BPHN	Adanya diskusi antara BPHN dengan OMS terkait rencana penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan	Adanya pemberian masukan dari BPHN terhadap kurikulum dan materi sosialisasi untuk penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan	Adanya keterlibatan BPHN dan OMS dalam sosialisasi penguatan kapasitas PBH untuk kelompok rentan	1. Kurikulum penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan 2. Materi sosialisasi untuk penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan	
			OMS (IJRS, PBHI, LBH APIK)	Adanya diskusi antara OMS dengan BPHN terkait rencana penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan	Adanya kurikulum dan materi sosialisasi untuk penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan yang diberi masukkan oleh BPHN	Adanya keterlibatan BPHN dan OMS dalam sosialisasi penguatan kapasitas PBH untuk kelompok rentan		

**MATRIKS TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI NASIONAL
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

Komitmen 14

Isu Strategis

Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab

Kementerian/Lembaga Terkait

Bappenas

OMS Mitra

Point of Contact Kementerian/Lembaga

Point of Contact OMS

: Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
: Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)
: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA); Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri
: Direktorat Hukum dan Regulasi; Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga
: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID); Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
: Indry (LPSK); Mercy (KPPPA)
: Rinto Leonardo Siahaan (rinto@infid.org); Dio Ashar Wicaksana (dio@ijrs.or.id)

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam UU TPKS	1.	Tersedianya peraturan turunan terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS yang disusun dengan melibatkan masyarakat sipil	KPPPA	Terlaksananya penyusunan draf peraturan turunan terkait UPTD PPA dengan masukan dari masyarakat sipil	Tersedianya peraturan turunan terkait UPTD PPA yang telah disusun dengan masukan dari masyarakat sipil	-	-	1. Kajian mengenai UPTD PPA 2. Peraturan turunan terkait UPTD PPA
			OMS (INFID)	Terlaksananya pengumpulan data persepsi warga dan operasionalisasi UU TPKS untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan mengenai UPTD PPA	Tersedianya kajian mengenai implementasi UU TPKS, khususnya terkait UPTD PPA untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan mengenai UPTD PPA	-	-	
	2.	Terlaksananya perbaikan tata kelola UPTD PPA serta perluasan cakupan dan penerima manfaat UPTD PPA	KPPPA		Tersedianya desain awal untuk standar penerapan UPTD PPA sesuai peraturan turunan dan masukan masyarakat luas	Terlaksananya perbaikan tata kelola UPTD PPA sesuai peraturan turunan dan masukan masyarakat luas	Terlaksananya sosialisasi sistem dan mekanisme UPTD PPA kepada Pemerintah Daerah dan jaringan masyarakat sipil level regional dan lokal	1. Desain awal standar penerapan UPTD PPA 2. Laporan evaluasi proses perbaikan tata kelola UPTD PPA
			OMS (INFID)		Tersedianya kajian terkait UPTD PPA, termasuk untuk	Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pemberian	Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam evaluasi	

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Pendukung
					masukan proses perbaikan tata kelola UPTD PPA	masukan terhadap proses perbaikan tata kelola UPTD PPA	proses perbaikan tata kelola UPTD PPA	3. Laporan hasil sosialisasi
	3.	Tersedianya peraturan turunan terkait Dana Bantuan Korban (DBK) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS	LPSK	1. Terlaksananya kepesertaan LPSK sebagai lembaga pengusul dan pengampu dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan PP (RPP) DBK 2. Terlaksananya konsultasi publik pembahasan RPP DBK	1. Terlaksananya kepesertaan LPSK sebagai lembaga pengusul dan pengampu dalam pembahasan RPP DBK pada tahap harmonisasi 2. Terlaksananya koordinasi k/L dalam proses pemberian persetujuan RPP DBK	Tersusunnya draf hasil PAK dan selesainya proses harmonisasi terhadap draf	1. Terlaksananya sosialisasi PP DBK 2. Tersusunnya Draft Peraturan turunan terkait DBK sebagai turunan RPP DBK	1. Kajian terkait DBK 2. Peraturan turunan (Perpres) terkait DBK
			Kemenkumham	1. Tercantumnya usulan draf dalam kerangka regulasi perencanaan 2. Tersusunnya konsepsi draf yang telah teruji kelayakan konsepsi draf	Terselenggaranya sosialisasi draf dalam rangka pelibatan publik secara luas	Tersusunnya draf hasil PAK dan selesainya proses harmonisasi terhadap draf	Penyampaian draf kepada Presiden untuk ditetapkan dan pengundangan dalam lembaran Negara	
			OMS (IJRS, INFID)	1. Terlaksananya penyusunan kajian terkait DBK untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan terkait DBK 2. Terlibatnya masyarakat sipil dalam konsultasi publik pembahasan RPP DBK	1. Tersedianya kajian terkait DBK untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan terkait DBK 2. Terlibatnya masyarakat sipil dalam sosialisasi draf dalam rangka pelibatan publik secara luas		Terlibatnya masyarakat sipil dalam sosialisasi PP terkait DBK	

Point of Contact CSO

: Antonius Aditanyo (tyo@icel.or.id)

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Dukung
Pengembangan Keterbukaan Data SDA-LH dan Tata Ruang	1.	Penyusunan data prioritas sektor SDA-LH yang partisipatif	KLHK KESDM KATR / BPN	Penyusunan daftar data prioritas di sektor lingkungan hidup dan SDA	Penyusunan daftar data prioritas di sektor lingkungan hidup dan SDA	Penyusunan standar verifikasi data dari hasil pertukaran data	Penyusunan standar verifikasi data dari hasil pertukaran data	
			ICEL PWY	1. Kajian urgensi dibentuknya gugus tematik satu data SDA & LH 2. Kajian data prioritas SDA & LH	Penyusunan kajian terkait pertukaran dan integrasi data di seluruh K/L/D	Kajian integrasi, pertukaran data, dan verifikasi data SDA & LH		
	2.	Pemetaan internal dalam K/L/D tentang masalah tata kelola Satu Data Sektor SDA-LH	KLHK KESDM KATR / BPN SDI	Penyusunan pemetaan internal dalam K/L/D tentang masalah tata kelola Satu Data Sektor LH-SDA	Forum Koordinasi kebutuhan Data Prioritas Sektor SDH-LH, yang melibatkan OMS	Forum Koordinasi kebutuhan Data Prioritas Sektor SDH-LH, yang melibatkan OMS	Forum Koordinasi kebutuhan Data Prioritas Sektor SDH- LH, yang melibatkan OMS	
			Icel, Media Link, PWYP Indonesia, Auriga Nusantara	Penyelenggaraan diskusi kelompok terpumpun antara CSO dengan masing-masing K/L/D untuk memetakan potensi dan tantangan pelaksanaan Satu Data Sektor LH-SDA	Penyusunan kertas kebijakan terkait usulan potensi dan tantangan pelaksanaan satu data sektor SDA-LH-SDA			
	3.	Penyelenggaraan forum satu data di sektor SDA-LH untuk persiapan data prioritas dan	KLHK KESDM KATR / BPN		Penyelenggaraan pra-forum data LH-SDA antara KLHK dan Pemerintah Daerah Piloting	Penyelenggaraan forum data LH-SDA rutin antara KLHK dan Pemerintah Daerah Piloting	Penyelenggaraan pra- forum data LH-SDA rutin antara KLHK dan Pemerintah Daerah Piloting	

Sasaran Keberhasilan	No.	Ukuran Keberhasilan	Penanggung Jawab	B06 (2023)	B12 (2023)	B18 (2024)	B24 (2024)	Data Dukung
		standar data, dan publikasi di portal data						
			Icel, Media Link, PWYP Indonesia, Auriga Nusantara		Diseminasi kertas kebijakan terkait potensi dan tantangan satu data di sektor LH-SDA sebagai rekomendasi dalam forum satu data di sektor lingkungan hidup-SDA		Diseminasi kertas kebijakan terkait potensi dan tantangan satu data di sektor LH-SDA sebagai rekomendasi dalam forum satu data di sektor lingkungan hidup-SDA	
	4.	Penyajian data SDA-LH dalam portal Satu Data Indonesia	KLHK KESDM KATR / BPN SDI				Dapat diaksesnya Data Prioritas LH-SDA di portal Satu Data Indonesia	